

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kenyataan bahwa negeri ini kaya akan sumber daya alam dan manusia tidak serta merta membuat kesejahteraan merata. Justru hal yang sebaliknya terjadi. Data pada bulan Maret 2020 menunjukkan proporsi kemiskinan penduduk perkotaan sebesar 7,38%, sedangkan penduduk desa mencapai 12,82% dimana pada september tahun sebelumnya kemiskinan kota sebesar 6,56% sedangkan di desa sebesar 12,60%.

**Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah,
Maret 2019-Maret 2020**

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	Persentase Penduduk Miskin
Perkotaan		
Maret 2019	9,99	6,69
September 2019	9,86	6,56
Maret 2020	11,16	7,38
Perdesaan		
Maret 2019	15,15	12,85
September 2019	14,93	12,60
Maret 2020	15,26	12,82
Total		
Maret 2019	25,14	9,41
September 2019	24,79	9,22
Maret 2020	26,42	9,78

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Menurut Tambunan dalam (Purnama, 2016) pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian pendapatan tersebut (*ceteris paribus*), yang kemudian akan menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan penambahan kemiskinan.

Dengan kasus kemiskinan desa lebih besar dari kota, tentu perlu ada strategi untuk mengurangi kemiskinan tersebut dengan cara menjadikan desa sebagai prioritas pembangunan nasional.

Untuk mencapai pembangunan dari desa, diperlukan strategi dalam mengatur pemerintahan desa sehingga mendapatkan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih optimal. BUMDes adalah salah satu perwujudan dari *rural entrepreneurship* yang didirikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan tujuan utamanya yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Adanya BUMDes dapat mendorong geliat ekonomi masyarakat perdesaan yang semula berjalan secara individu menjadi berkelompok dengan bantuan pemerintah desa.

Badan Usaha Milik Desa mempunyai landasan hukum ialah Undang-undang Desa No 6 Tahun 2014 pada pasal 87, yang berbunyi; “Desa bisa mendirikan badan usaha milik desa sesuai kebutuhan serta kemampuan desa”. Riset yang dilakukan (Darwita & Redana, 2018) menciptakan perencanaan pembangunan Desa Tejakula dalam upaya memberdayakan BUMDes Teja Kusuma mempunyai fungsi untuk, satu, mengatasi pengangguran, dalam hal ini bisa berperan selaku yang menstabilkan, yang menginovasi, pionir serta eksekutor, secara universal BUMDes ini bisa disebut telah berhasil. Yang kedua kedudukan BUMDes didalam pengembangan kemampuan warga merupakan penguatan kemampuan serta memberdayakan masyarakat dan mengatasi pengangguran, perihal tersebut bisa dikatakan berjalan dengan baik.

Keunggulan BUMDes di Kabupaten Jepara dalam penelitian (Agunggunanto, Arianti, Wibowo, & Darwanto, 2016) dapat meringankan beban warga yang hendak meminjam dana untuk usaha, dan selaku wadah untuk menampung produk usaha-usaha mikro masyarakat, BUMDes juga kerap mengadakan pelatihan serta tutorial yang bekerja sama dengan lembaga pemerintah ataupun swasta seperti pengolahan lanjutan hasil pertanian serta pemasaran. Sebaliknya kelemahannya adalah atensi warga

untuk meminjam sangat besar, namun tidak diimbangi oleh dana yang ada, BUMDes juga sedikit kesusahan untuk melaksanakan unit usaha yang lain sebab sebagian besar BUMDes dananya terbatas untuk pinjaman warga saja. Aspek keterbatasan sumber energi manusia yang mengelola BUMDes. Tingkat pengetahuan serta wawasan warga desa yang rendah dan pola pikir warga yang belum terbuka menyebabkan sulitnya mengganti mindset seseorang untuk mengawali kelompok usaha.

Hal serupa diungkapkan (Kresnawati, 2019) dalam penelitiannya, terdapat sebagian hal yang menjadi perkara mendasar untuk BUMDes. antara lain terbatasnya sumber daya manusia dalam mengelola unit usaha yang ada dalam BUMDes itu sendiri. Sedikitnya kreativitas dan pembaruan dalam mengelola penciptaan untuk BUMDes yang unit usahanya dibidang produksi ataupun wisata menjadi masalah lain. Produk yang dihasilkan oleh BUMDes belum sanggup bersaing dengan buatan pabrik, dan keahlian untuk menggali kemampuan lokal desa serta perencanaan bisnis yang masih kurang.

Untuk itu Pemerintah memberikan kesempatan kepada desa-desa untuk membentuk BUMDesa Bersama disamping BUMDesa yang dibangun oleh tiap-tiap desa. BUMDesa Bersama ini cocok dibangun oleh desa-desa yang mempunyai keterbatasan pada banyak aspek (permodalan, sumber energi manusia, kemampuan serta lain-lain). Undang-undang 6/2014 tentang Desa menjelaskan kalau BUMDesa bisa dibangun oleh satu desa ataupun kerjasama sebagian desa membentuk satu BUMDesa. BUMDesa Bersama bisa dinyatakan selaku tubuh usaha yang dibangun oleh 2 desa ataupun lebih, yang segala ataupun sebagian besar modalnya dipunyai oleh 2 Desa ataupun lebih. BUMDesa Bersama dibangun melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) bersumber pada Peraturan Bersama Kepala Desa. Diharapkan

kebersamaan ini hendak menimbulkan kekuatan baru yang menjamin keberlangsungan serta pengembangan unit-unit usaha yang didirikannya. (Viviana, 2020)

BUMDes Bersama tidak hanya terbentuk atas inisiatif 2 desa atau lebih melalui musyawarah antar desa, melainkan adanya perintah dari Kemendes PDDT dalam upaya menyelamatkan aset Eks-PNPM sehingga lembaga yang sudah purna tersebut diminta bertransformasi menjadi BUMDesma.

Dilansir dari laman BPMD Jawa Timur, terhitung hingga tahun 2020 ada 107 BUMDESMA yang tersebar pada 16 Kabupaten.

Tabel 1.2 BUMDESMA di Jawa Timur

No.	Kabupaten	Total
1	Kabupaten Banyuwangi	7 Bumdesma
2	Kabupaten Blitar	1 Bumdesma
3	Kabupaten Gresik	5 Bumdesma
4	Kabupaten Jombang	1 Bumdesma
5	Kabupaten Kediri	1 Bumdesma
6	Kabupaten Lamongan	24 Bumdesma
7	Kabupaten Malang	24 Bumdesma
8	Kabupaten Nganjuk	17 Bumdesma
9	Kabupaten Ngawi	1 Bumdesma
10	Kabupaten Pamekasan	1 Bumdesma
11	Kabupaten Pasuruan	7 Bumdesma
12	Kabupaten Ponorogo	1 Bumdesma
13	Kabupaten Sampang	1 Bumdesma
14	Kabupaten Sumenep	1 Bumdesma
15	Kabupaten Trenggalek	2 Bumdesma
16	Kabupaten Tulungagung	14 Bumdesma
Total		107 Bumdesma

Sumber: BPMD Jatim, 2020

Di antara banyaknya BUMDesma yang tersebar di 16 kabupaten tersebut, di Kabupaten Lamongan dan Malang adalah 2 kabupaten dengan jumlah BUMDesma terbanyak. Malang adalah kabupaten yang PDRB nya di dominasi oleh pariwisata, sedangkan Lamongan, PDRB nya didominasi oleh pertanian. Dari sekian BUMDesma yang ada di Kabupaten Lamongan, ada 1

BUMDesma yang merupakan *pilot project*. BUMDesma pertama ini terlelak di Kecamatan Sekaran, bernama Sekar Mandiri. Bumdesma ini berdiri sejak tahun 2018 sebagai transformasi dari PNPM dan menaungi 21 desa yang berada di Kecamatan Sekaran serta mengelola aset kurang lebih 4 Miliar Rupiah dengan tingkat pertumbuhan 200% dari modal awal. Dari aset tersebut ada 2 unit usaha yang dikelola oleh Bumdesma Sekar Mandiri.

Tabel 1.3 Unit Usaha BUMDesma Sekar Mandiri

No	Unit usaha	Status
1.	Simpan Pinjam	Aktif
2.	Pemasaran Produk Unggulan Kecamatan	Aktif
3.	Penyewaan Alat-Alat Berat	Belum Aktif
4.	Penjualan Saprodi Pertanian	Belum Aktif

Sumber: Kantor Bumdesma Sekar Mandiri

Menurut Direktur BUMDesma, Edi Susilo, Sekar Mandiri sering mengikutsertakan produk unggulan kecamatan dalam kegiatan Minggu Ceria (MinCe) di alun-alun Lamongan sehingga dengan gencarnya promosi, progress yang dimiliki signifikan dalam waktu 2 tahun.

Dari tabel 1.2, simpan pinjam dan pemasaran produk unggulan Kecamatan adalah unit usaha yang berstatus aktif. Sedangkan ada 2 unit usaha lain yang berstatus belum aktif, yakni; penjualan jasa alat pertanian dan pengadaan bahan bangunan.

Basis perekonomian di kecamatan Sekaran adalah pertanian, yang paling unggul yaitu produksi padi dengan luas panen 7.050 Ha mendapat hasil 49.880 Ton GKP dan produksi jagung sebesar 10.356 Ton dari luas lahan 1.482 Ha pada tahun 2020. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, 2020).

Melihat besarnya antusias kepala desa untuk mendirikan BUMDesma terbukti dengan tabel 1.1 dimana Jawa Timur di tahun 2020 telah memiliki 107 BUMDesma, dan terbatasnya kajian ilmiah dengan tema BUMDes bersama membuat penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai literatur tambahan sehingga akan berguna untuk pihak-pihak yang membutuhkan. Serta untuk mengetahui tata kelola BUMDesma *Pilot Project* Kabupaten Lamongan yang masih eksis hingga hari ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana peran Bumdesma Sekar Mandiri dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kecamatan Sekaran, Lamongan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Menganalisis peran Bumdesma Sekar Mandiri dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kecamatan Sekaran, Lamongan?”

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan menjadi bahan pertimbangan bagi stakeholder yang terlibat dalam

BUMDes bersama untuk menentukan strategi yang tepat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan perumusan kebijakan dalam menentukan strategi pemberdayaan yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.
- b. Bagi masyarakat Sekaran khususnya diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan dalam melakukan transaksi dengan BUMDesma Sekar Mandiri serta mengetahui manfaatnya.